

**KOORDINASI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BANYUWANGI DALAM MENINGKATKAN ANGKA HARAPAN LAMA
SEKOLAH MELALUI BANYUWANGI SATU DATA**

Calvia Rosa Aendi

NPP. 30.0786

*Asdaf Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan
Email: 30.0786@praja.ipdn.ac.id*

Pembimbing Skripsi: Drs. James Robert Pualillin, M.Si & Agung Nurrahman, S.STP, M.P.A

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): According to data from the Central Bureau of Statistics of Banyuwangi Regency in 2021, there are still many people in Banyuwangi Regency who have stopped going to school at the junior and senior high school levels. In fact, many also do not graduate at that level. It is hoped that policy makers in each Regional Apparatus of Banyuwangi Regency can jointly take advantage of the abundant availability of data by optimizing coordination through data forums in accordance with applicable regulations to overcome problems in Banyuwangi Regency, especially the problem of low Old Expectations of Banyuwangi Schools. **Purpose:** The purpose of this study is to analyze the picture of unity of action in the implementation of coordination between the Banyuwangi Regency Communication and Information Office and related agencies to increase the number of Old Expectations of Banyuwangi Regency Schools. **Method:** The research method used is a descriptive qualitative research method. Data collection techniques used by researchers are interviews and observations. The researchers use the theory of government coordination to analyze the problems faced. **Result:** The results showed that the unity of disciplinary action and division of labor had gone well in an effort to improve the old expectations of schools in Banyuwangi Regency. **Conclusion:** Coordination carried out by relevant agencies in collecting data on out-of-school children in Banyuwangi Regency has been carried out in accordance with the main duties and functions of each. In addition, the existence of sectoral egos between agencies creates obstacles in coordination carried out in data collection.

Keywords: Banyuwangi One Data, Old School Expectations, Banyuwangi Regency, Coordination

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi tahun 2021, masih banyak masyarakat Kabupaten Banyuwangi yang berhenti sekolah di tingkat SMP dan SMA. Bahkan, banyak juga yang tidak lulus di tingkatan tersebut. Besar harapan para pemangku kebijakan di masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat bersama-sama memanfaatkan ketersediaan data yang melimpah dengan mengoptimalkan koordinasi melalui forum data sesuai peraturan yang berlaku untuk mengatasi permasalahan di Kabupaten Banyuwangi, khususnya permasalahan rendahnya Harapan Lama Sekolah Banyuwangi. **Tujuan:** Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk menganalisis gambaran mengenai kesatuan tindakan dalam pelaksanaan koordinasi Dinas Kominfo Kabupaten Banyuwangi dengan instansi terkait untuk meningkatkan angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banyuwangi. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yakni wawancara dan observasi. Adapun peneliti menggunakan teori koordinasi pemerintahan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesatuan tindakan kedisiplinan dan pembagian kerja telah berjalan dengan baik dalam upaya meningkatkan harapan lama sekolah di Kabupaten Banyuwangi. **Kesimpulan:** Koordinasi yang dilakukan instansi terkait dalam pendataan anak putus sekolah di Kabupaten Banyuwangi sudah dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Selain itu masih adanya ego sektoral antar instansi menimbulkan hambatan dalam koordinasi yang dilakukan dalam pendataan.

Kata kunci: Banyuwangi Satu Data, Harapan Lama Sekolah, Kabupaten Banyuwangi, Koordinasi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (2), terdapat urusan yang menangani komunikasi dan informatika. Urusan komunikasi dan informatika menjadi bagian tanggung jawab dari pemerintah daerah yang wajib diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan publik, tetapi tidak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah memerlukan adanya pengembangan pelayanan publik secara digital dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi ini berdampak pada perubahan cara berkomunikasi baik di tingkat masyarakat domestik maupun internasional. Teknologi informasi dan komunikasi telah membuka pintu bagi interaksi dan jalan baru untuk pertumbuhan sosial, intelektual, ekonomi serta politik.

Kebijakan pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat lebih jelas dan cepat. Penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi juga merupakan upaya pemerintah untuk menjalankan tugas dengan prinsip transparansi. Transparansi memiliki makna tersedianya akses bagi setiap orang untuk memperoleh informasi data yang cukup, cepat, mudah, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pemerintahan yaitu informasi tentang kebijakan meliputi proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Manfaat adanya transparansi pada data-data yang disajikan sangat berguna bagi masyarakat untuk mengetahui secara lebih transparan data-data mengenai pemerintahan, sehingga dapat mewujudkan Open Government yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi mendorong Pemerintah Indonesia membuat sebuah kebijakan agar perubahan yang terjadi menjadi lebih cepat. Kebijakan tersebut tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Indonesia telah memulai langkah menuju data driven government, yaitu pemerintahan yang berbasis kepada data. Peraturan presiden tersebut menyatakan pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Data merupakan suatu jenis kekayaan baru dan saat ini data adalah new oil, bahkan lebih berharga dari minyak. Data yang valid merupakan kunci utama kesuksesan pembangunan sebuah negara.

Saat ini informasi merupakan hal yang sangat penting. Data dapat memberikan informasi yang berguna untuk perencanaan, pengambilan keputusan, dan kebijakan publik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta evaluasi dalam suatu penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan data masih terdapat persoalan. Salah satu persoalan data di Indonesia adalah ketidaksesuaian antara data nasional dan daerah.

Upaya dalam mengatasi persoalan data juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Kominfo Kabupaten Banyuwangi atau yang biasa juga disebut Dinas Kominfo Kabupaten Banyuwangi optimis melalui pemanfaatan data berupaya untuk melakukan pembenahan tata kelola data di Kabupaten Banyuwangi.

Banyuwangi Satu Data adalah sebuah upaya Pemerintah Banyuwangi dalam mendorong pengambilan kebijakan daerah secara konsisten dan berkesinambungan berdasarkan data. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupaya memanfaatkan data-data yang ada di dalam Banyuwangi Satu Data menjadi informasi guna menentukan dan merumuskan kebijakan terbaik untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Salah satu dari persoalan tersebut adalah masalah rendahnya Harapan Lama Sekolah Banyuwangi. Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan lamanya sekolah yang dihitung dalam tahun yang diharapkan ditempuh seseorang pada umur yang ditentukan. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi tahun 2021, masih banyak masyarakat Kabupaten Banyuwangi yang berhenti sekolah di tingkat SMP dan SMA. Bahkan, banyak juga yang tidak lulus di tingkatan tersebut. Persentase penduduk Kabupaten Banyuwangi usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai ijazah SD sebanyak 22,23 persen, tamat Sekolah Dasar (SD) atau sederajatnya sebesar 26,34 persen, tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 20,80 persen, dan tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) 25,12 persen. Sebanyak 94,49 persen penduduk Kabupaten Banyuwangi usia 15 tahun ke atas hanya tamatan SMA ke bawah. Besar harapan para pemangku kebijakan di masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat bersama-sama memanfaatkan ketersediaan data yang melimpah dengan mengoptimalkan koordinasi melalui forum data sesuai peraturan yang berlaku untuk mengatasi permasalahan di Kabupaten Banyuwangi, khususnya permasalahan rendahnya Harapan Lama Sekolah Banyuwangi.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi tahun 2021, masih banyak masyarakat Kabupaten Banyuwangi yang berhenti sekolah di tingkat SMP dan SMA. Bahkan, banyak juga yang tidak lulus di tingkatan tersebut. Persentase penduduk Kabupaten Banyuwangi usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai ijazah SD sebanyak 22,23 persen, tamat Sekolah Dasar (SD) atau sederajatnya sebesar 26,34 persen, tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 20,80 persen, dan tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) 25,12 persen. Sebanyak 94,49 persen penduduk Kabupaten Banyuwangi usia 15 tahun ke atas hanya tamatan SMA ke bawah. Besar harapan para pemangku kebijakan di masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat bersama-sama memanfaatkan ketersediaan data yang melimpah dengan mengoptimalkan koordinasi melalui forum data sesuai peraturan yang berlaku untuk mengatasi permasalahan di Kabupaten Banyuwangi, khususnya permasalahan rendahnya Harapan Lama Sekolah Banyuwangi.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks koordinasi pemerintahan dalam meningkatkan angka harapan lama sekolah. Jurnal penelitian Budi & Fatahilah (2019) dengan judul penelitian “Koordinasi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Penduduk Rentan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah” yang berfokus pada analisis koordinasi pemerintah dalam mewujudkan tertib administrasi penduduk di Kota Palu; Jurnal penelitian

Wulandari dkk. (2018) dengan judul penelitian “Program Sosialisasi Pendidikan Untuk Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)” yang berfokus pada analisis program sosialisasi pendidikan untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah; Penelitian Islami (2021) dengan judul penelitian “Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors (CSFs)” yang membahas mengenai implementasi satu data Indonesia dalam menghadapi tantangan yang ada.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni koordinasi pemerintahan dalam meningkatkan angka harapan lama sekolah di Kabupaten Banyuwangi. Metodenya yang digunakan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Islami (2021) dan Wulandari dkk. (2018). Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori koordinasi pemerintahan Hasibuan (2011) yang menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi koordinasi yakni Kesatuan tindakan, Komunikasi, Pembagian kerja, dan disiplin.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gambaran mengenai kesatuan tindakan dalam pelaksanaan koordinasi Dinas Kominfo Kabupaten Banyuwangi dengan instansi terkait untuk meningkatkan angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banyuwangi

II. METODE

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap beberapa orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Banyuwangi, Kepala Bidang Statistik dan Persandian, Kepala Seksi Statistik dan Admin Banyuwangi Satu Data. Adapun teknik analisis yang digunakan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam analisisnya menggunakan teori koordinasi pemerintahan Hasibuan (2011) yang menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi koordinasi yakni Kesatuan tindakan, Komunikasi, Pembagian kerja, dan disiplin.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis koordinasi pemerintahan dalam meningkatkan angka harapan lama sekolah di Kabupaten Banyuwangi menggunakan teori koordinasi pemerintahan Hasibuan (2011) yang menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi koordinasi yakni Kesatuan tindakan, Komunikasi, Pembagian kerja, dan disiplin. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Kesatuan Tindakan

Indikator kesatuan tindakan menurut Hasibuan dapat diukur dengan melihat bagaimana kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan daripada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha daripada setiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil.

Kesatuan tindakan ini merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Instansi atau dinas yang ikut berpartisipasi dalam

pelaksanaan koordinasi antar instansi ini mengutus pejabat yang terlibat di dalamnya sebagai anggota. Pengutusan pejabat sebagai anggota atas pelaksanaan koordinasi ini dikarenakan kegiatan koordinasi rapat kerja lintas sektor sangat penting dalam mengatasi permasalahan HLS di Kabupaten Banyuwangi. Dinas Kominfo Banyuwangi sebagai wali data statistik sektoral dalam Forum Satu Data optimis melalui pemanfaatan data dapat mengatasi permasalahan HLS di Banyuwangi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Kominfo dapat diketahui dan disimpulkan bahwa kesatuan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Banyuwangi sudah berjalan dengan baik dengan adanya satu tujuan dan kesatuan tindakan yang dipedomani oleh aparatur yang melaksanakan tugas dalam pelaksanaan koordinasi untuk mengatasi permasalahan terkait HLS. Melalui koordinasi instansi dan dinas yang terkait dapat mengetahui apa yang harus dilakukan sesuai dengan tupoksi instansi masing-masing.

3.2. Komunikasi

Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada bawahan harus dengan komunikasi. Bidang terkait yang bertugas dalam pengelolaan data pendidikan harus melakukan komunikasi yang intens agar tidak ada kesalahan informasi di dalamnya yang menyebabkan pendataan terkait HLS tidak berjalan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Banyuwangi dapat disimpulkan bahwa sudah terjadi komunikasi yang baik antara pimpinan dengan bawahan serta respect memotivasi para bawahan untuk mewujudkan pengelolaan Banyuwangi Satu Data yang baik. Sementara itu hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti mengamati bahwa komunikasi yang baik belum efektif dilakukan dalam pengelolaan Banyuwangi Satu Data dikarenakan sumberdaya yang ada pada Dinas Kominfo Kabupaten Banyuwangi terbatas dengan beban tugas yang relatif sangat padat.

3.3. Pembagian Kerja

Pada prinsipnya suatu organisasi terbentuk untuk mewujudkan tujuan bersama, dengan demikian untuk mencapainya tidak dapat dilakukan secara individu melainkan harus berkelompok yang bekerja sama dan berkolaborasi dalam pencapaiannya. Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya adalah prinsip pembagian kerja (Division of labor). Prinsip pembagian kerja dimaksudkan agar organisasi dalam pencapaian tujuannya harus melakukan pembagian kerja yaitu uraian atau rincian tugas dan pekerjaan bagi setiap individu dalam organisasi dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya secara terbatas.

Secara keseluruhan pengelolaan Banyuwangi Satu Data dapat berkontribusi dalam meningkatkan angka HLS di Kabupaten Banyuwangi melalui analisis yang lebih komprehensif dan efektif serta mempermudah lembaga pendidikan dalam memantau kemajuan siswa dan mengevaluasi program-program pendidikan. Dinas Kominfo menjadi satuan kerja yang bertanggung jawab atas terbentuknya Tim Koordinasi Forum Satu Data Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/139/KEP/429.011/2021 tentang Tim Koordinasi Forum Satu Data Kabupaten Banyuwangi. Forum Satu Data ini memiliki tugas berkoordinasi dan berkomunikasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data di Kabupaten Banyuwangi, termasuk permasalahan HLS.

3.4. Disiplin

Pada setiap organisasi yang baik dan kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian yang berbeda-beda agar kegiatan daripada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga

masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan, untuk itu diperlukan kedisiplinan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Banyuwangi diketahui bahwa kedisiplinan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam pengelolaan Banyuwangi Satu Data khususnya dalam mengatasi permasalahan HLS, selain itu berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya Dinas Kominfo sudah melaksanakan kinerja dan kewajibannya dengan disiplin seperti datang tepat waktu, melakukan pertemuan forum Satu Data Banyuwangi, forum lintas SKPD, kegiatan weekly performance dalam rangka memacu keterisian data sektoral pada portal Banyuwangi Satu Data.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Salah satu indikator dalam menganalisis koordinasi berdasarkan teori koordinasi pemerintahan Hasibuan (2011) yakni kesatuan tindakan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kesatuan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Banyuwangi sudah berjalan dengan baik dengan adanya satu tujuan dan kesatuan tindakan yang dipedomani oleh aparatur yang melaksanakan tugas dalam pelaksanaan koordinasi untuk mengatasi permasalahan terkait HLS. Temuan tersebut memperkuat temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Budi & Fatahilah (2019) yang dalam kesimpulan penelitiannya juga diperlukannya kesatuan tindakan dalam rangka koordinasi pemerintahan.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan bahwa komunikasi yang baik belum efektif dilakukan dalam pengelolaan Banyuwangi Satu Data dikarenakan sumberdaya yang ada pada Dinas Kominfo Kabupaten Banyuwangi terbatas dengan beban tugas yang relatif sangat padat.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa koordinasi yang dilakukan instansi terkait dalam pendataan anak putus sekolah di Kabupaten Banyuwangi sudah dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Selain itu masih adanya ego sektoral antar instansi menimbulkan hambatan dalam koordinasi yang dilakukan dalam pendataan. Belum adanya sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor susahnya untuk mengumpulkan data anak putus sekolah. Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan pendataan anak putus sekolah telah melakukan upaya mengatasi masalah yang menjadi hambatan dengan mengadakan rapat koordinasi agar pembagian tugas sesuai dengan fungsi masing-masing.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan koordinasi pemerintahan dalam meningkatkan angka harapan lama sekolah di Kabupaten Banyuwangi untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Banyuwangi beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Budi, A., & Fatahilah, A. (2019). Koordinasi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Penduduk Rentan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Registratie*, 1(1), 61–78.

Hasibuan, M. S. P. (2011). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Islami, M. J. (2021). *Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors (CSFs)*. Samarinda: Universitas Mulawarman.

Wulandari, R. W., Kholik, A., Qudsiyah, M., & Agustian, R. (2018). Program Sosialisasi Pendidikan Untuk Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). *Jurnal Registratie*, 2(1).

